

UPAYA MENGIMPLEMENTASI WIBAWA PENEGAK HUKUM MELALUI PENEMUAN HUKUM

M. Yasin Soumena

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: yasinsoumena@yahoo.com

Abstract: *The existence of laws in the midst of society is to protect the interests of human beings that need to be enforced and implemented. In enforcement, often clash between fair and unfair, but all that is relative. Therefore, to fulfill a sense of justice, any rule of law made always comes with an explanation. However, once it was called the explanation, it often creates a new explanation for just described "pretty clear" the text of the law alone, so it still requires more explanation. Coupled with the rules that no longer fit with the demands of the times. This is where the legal discovery required by either law enforcement or interpretation of legal discovery freely outside the law. This way will give birth to the authority of law enforcement officials in the midst of society*

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penemuan Hukum

I. PENDAHULUAN

Membicarakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena hukum dan manusia sama-sama menjadi satu kesatuan. Asal mula manusia itu dibentuk atau diproses berdasar pada hukum; ia lahir dijempit oleh hukum; ia hidup diatur oleh hukum; dan bahkan saat meninggal pun ia diantar oleh hukum. Manusia sangat membutuhkan aturan-aturan untuk mengatur hidup dan kehidupannya, dan hukum itu sendiri bisa terbentuk manakala ada manusia.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo,¹ dalam pergaulan manusia, kepentingan-kepentingan senantiasa berbenturan satu sama lain, maka keberadaan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi justru kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum dapat memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain. Karenanya, hukum berusaha mempertimbangkan sedteliti

mungkin kedua jenis kepentingan itu sehingga terdapat keseimbangan. Hukum itu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara adil, yakni suatu penyelesaian yang terfokus pada unsur keseimbangan kepentingan yang bertentangan itu, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak memberi kepuasan untuk semua pihak.

Sudikno Mertokusumo,² menyebutkan, keberadaan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Bagaimana hukum itu harus diberlakukan; pada dasarnya tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk menyimpang dari aturan-aturan hukum tersebut.

Setiap individu maupun kelompok masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum. Ini berarti keberadaan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum pun harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya ditegakkan akan membawa keresahan dalam masyarakat.³

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur ini perlu mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Hanya saja dalam praktik tidak selalu mudah untuk mengkompromi ketiga unsur tersebut. Sebab kadangkala diperhambat dengan sebuah aturan yang tidak jelas.

Pengakuan Sudikno Mertokusumo,⁴ undang-undang tidak selamanya sempurna. Sebab tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur kehidupan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap, dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang tetap dijalankan.

Menurut Trias Kuncahyono,⁵ terjadi ketidaksesuaian antara masyarakat dengan para penegak hukum, misalnya soal keadilan. Dalam hal ini masing-masing mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Tidak jarang dalam suatu kasus, penegak hukum menganggap keadilan sudah ditegakkan dan terpenuhi, tetapi masyarakat menganggap belum. Hal ini terjadi karena penegak hukum mengukur rasa keadilan dari segi prosedural (keadilan formal) sedangkan masyarakat dari pengertian substansitif.

Apabila keadaan yang demikian dialami oleh setiap aparat penegak hukum, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah para penegak hukum perlu menemukan hukum-hukum yang hidup di luar undang-undang itu sendiri. Sebab, untuk penegakan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat perlu ada

pelaksanaan penemuan hukum, yang tidak sekadar penerapan hukumnya semata.

Pelaksanaan penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo,⁶ harus dipahami sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.

Pelaksanaan penemuan hukum, ternyata tidak dilakukan secara sembarangan akan tetapi perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan penafsiran dan metodologi yang telah dicetuskan oleh para ahli hukum. Dengan pertimbangan tersebut, maka tulisan ini mencoba mempertanyakan dan menjelaskan: *1) Bagaimana persepsi ahli hukum tentang penemuan hukum itu; dan 2) Tata cara apa yang harus dilakukan dalam menemukan hukum, sehingga dapat tercipta penegakan wibawa hukum di tengah-tengah masyarakat ?*

II. PEMBAHASAN

A. Persepsi Ahli Hukum Tentang Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo,⁷ menjelaskan, pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut telah diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang apa yang dibebankan oleh hukum terhadap orang itu.

Dalam kaitannya dengan hakim, menurut Sudikno,⁸ langkah ini perlu dilakukan dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kewibawaan hakim. Selain hakim, ilmuwan hukum pun perlu mengadakan penemuan hukum.

Hanya bedanya, kalau hasil penemuan hukum yang dilaksanakan oleh hakim itu adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilaksanakan oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga. Sebab bila doktrin ini kalau diikuti dan digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, maka menjadi hukum.

Achmad Ali,⁹ yang juga salah seorang ahli hukum yang menganut penemuan hukum ini menjelaskan, bagi siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataan tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasi terhadap teks tersebut.

Dengan begitu, maka penemuan hukum harus dilakukan. Dalam penemuan hukum ini, kata Sidikno Mertokusumo,¹⁰ dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan lain-lain. Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang.

Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya. Kemudian hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Ini merupakan salah satu pandangan dari Montesquieu tentang negara ideal. Karena

di dalam negara ideal, menurut Montesquieu, hakim harus tunduk pada undang-undang, karena semua hukum itu terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian hakim harus menerapkannya terhadap peristiwa yang konkrit.¹¹

Term-term dari aliran di atas kemudian diluruskan oleh Portalis, yang berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah diterapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.¹² Hal ini menunjukkan, penegak hukum dalam menjalankan tugasnya perlu menemukan hukum, agar dalam proses hukum tetap menjunjung tinggi keadilan dan kewibawaan penegak hukum maupun dari hukum itu sendiri.

B. Tata Cara Penemuan Hukum

Sesungguhnya, diakui atau tidak diakui setiap aturan hukum yang lahir dari buatan manusia pasti punya kekurangan. Kalau pun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia yang beraneka ragam. Undang-undang hasil buatan manusia mempunyai keterbatasan, sesuai dengan keterbatasan manusia itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹³ setiap ketentuan undang-undang tidak begitu saja diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Sebab untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa konkrit dan khusus, maka ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan untuk disesuaikan dengan

peristiwanya. Kemudian diterapkan pada peristiwa tersebut. Dengan demikian peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkrit, sesudah itu ditafsirkan undang-undang untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kata kuncinya, setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwa hukumnya.

Para ahli hukum mencoba memperlihatkan beberapa cara dalam penemuan hukum. Misalnya menurut Achmad Ali,¹⁴ ada dua jenis penemuan hukum, yakni 1) jenis *interpretasi*; dan 2) jenis metode *konstruksi*. Jenis-jenis interpretasi yang dianut dewasa ini adalah: a) *Subsumtif*, yakni seorang hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme; b) *Gramatikal*, yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang yang sesuai dengan kaedah bahasa, kaedah hukum dan tata bahasa; c) *Historis*, yakni interpretasi menurut sejarah undang-undang dan sejarah hukum; d) *Sistimatis*, adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan; e) *Sosiologis* atau *teleologis*, yakni menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan; f) *Komparatif*, yakni membandingkan antara berbagai sistem hukum; g) *Futuristik*, menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum; h) *Restriktif*, metode interpretasi yang sifatnya membatasi, dan i) *Ekstensif*, adalah metode interpretasi yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

Sedangkan metode konstruksi, tulis Achmad Ali, yakni terdiri dari: a) *Metode Analogi*, yakni hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang

diatur oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim; b) *Argumentum*, yakni suatu penafsiran yang diarahkan pada undang-undang yang memberikan batasan pada peristiwa tertentu; c) *Pengkonkritan hukum*, yakni mengkonkritkan suatu aturan hukum yang selalu abstrak; dan d) *Fiksi hukum*, yakni menganggap bahwa setiap orang mengetahui undang-undang.

Ada cara lain yang bisa ditempuh dalam penemuan hukum, yakni melalui penemuan hukum bebas. Hal mana menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁵ bahwa undang-undang harus dihormati, tetapi undang-undang pun akan selalu ketinggalan zaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dibolehkan melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkrit. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat pada undang-undang ini, para ahli hukum menyebutnya sebagai penemuan hukum bebas. Dalam penemuan hukum bebas ini hakim mengikuti zamannya dan akan memperbaharui peraturan-peraturan hukum yang tidak sesuai dengan zaman tersebut.

Faham utilitarian¹⁶ pun mencoba memberikan semacam pemahaman kepada para penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan, yang penulis lihat sebagai upaya penemuan hukum. Menurut utilitarian, setiap tindakan manusia merupakan keputusan dari hasil olah pikir rasional berdasarkan analisis *cost-benefit*. Artinya, dalam setiap tindakan manusia akan mempertimbangkan keuntungan tindakan dan akibatnya. Jika akibatnya

lebih besar dari tindakan keuntungannya, tidak akan dilakukan, tetapi jika lebih besar keuntungan dari akibatnya, tindakan akan dilakukan.

Karenanya, dalam setiap keputusan peradilan, harus dianalisis terlebih dahulu konsekuensinya (akibatnya). Ukuran konsekuensi itu adalah derita atau kesenangan manusia. Jadi, menurut aliran ini hukum dapat saja dilanggar jika pelanggaran itu diperlukan untuk memberikan konsekuensi yang lebih baik. Oleh karena itu, tindakan melanggar hukum boleh dilakukan jika aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

Contoh lain, seorang sopir taksi yang ngebut di jalan raya karena mengejar waktu untuk tiba di bandara (supaya penumpangnya tidak terlambat), akan berbeda dengan peristiwa lain apabila seorang sopir taksi ngebut di jalan raya karena membawa penumpang yang sedang sakit ke rumah sakit. Mobil pemadam kebakaran atau ambulans yang sedang menjalankan tugas tidak dikatakan melanggar peraturan lalu lintas, sekalipun untuk tiba di lokasi kebakaran, mobil itu telah menerobos atau melanggar *traffic-light* dan peraturan lalu lintas lainnya.

Utilitarian berpandangan, bahwa “hak” hanya ada jika mendukung kesejahteraan individu, yang pada akhirnya juga kesejahteraan masyarakat. Ukuran kesejahteraan atau penderitaan di satu sisi dan moral di sisi lain memiliki hubungan relevan. Bahkan membunuh seorang yang tidak berdosa mungkin merupakan jalan keluar dan terbaik, kalau bertujuan dapat menyelamatkan dua atau lebih nyawa yang tidak berdosa. Berdasarkan pandangan inilah, Robin Hood adalah pahlawan, bukan pencuri dan pembunuh, karena mencuri dari orang kaya dapat menyelamatkan atau mengakibatkan kesejahteraan bagi si miskin. Kesejahteraan bagi si miskin mungkin lebih besar dari pencederaan yang dialami oleh si kaya karena kehilangan hartanya.

Tata cara penemuan hukum seperti di atas bila dilakukan dengan baik, maka pasti penegakan wibawa aparat penegak hukum dapat tercapai. Hal ini harus ditempuh oleh para penegak hukum untuk menghindari berbagai cemohan yang dilontarkan oleh masyarakat. Ini harus diakui, sebab menurut Mantan Menko Polhukam, Soesilo Soedarman,¹⁷ lembaga peradilan hendaknya melakukan introspeksi dan menerima masukan serta kritikan dari masyarakat dengan lapang dada. Masyarakat sangat mengharapkan lembaga peradilan berperan optimal dalam menegakan wibawa hukum dan keadilan demi terselenggaranya hukum. Demi tegaknya wibawa hukum dan kebebasan proses peradilan, hakim yang ditunjuk menangani perkara agar tidak bersikap ragu-ragu menjalankan misi keadilannya dengan menolak campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Di dalam negara kita yang berdasarkan hukum ini dan bukan berdasarkan kekuasaan semata, hukum harus tegak berdiri dengan segala keagungan dan kewibawaannya. Masyarakat makin lama makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan menyejukkan hati. Untuk itu usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mengayomi masyarakat harus mendapat perhatian utama. Tentunya hal ini bisa dicapai apabila para penegak hukum tidak kaku dalam mencari atau menemukan hukum-hukum di luar aturan yang ada. Penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum demi memelihara kewibawaan hukum itu sendiri.

Soesilo Soedarman mengingatkan,¹⁸ hakim adalah tempat dan harapan terakhir pencari keadilan. Karena itu, dalam memutuskan perkara, selain bertanggung jawab terhadap pencari keadilan, hakim juga bertanggung jawab kepat Tuhan Yang Maha Adil, kepada masyarakat dan

kepada hukum. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri. Ini berarti setiap hakim harus membentengi diri dengan wawasan yang luas, mental yang tangguh dan hati nurani yang bersih (bening).

Pesan Bismar Siregar, yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung,¹⁹ bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat, melalui putusan yang terdiri dari pertimbangan hukum dan amar putusan itu sendiri. Oleh sebab itu pertimbangan putusan hakim harus memberi isi dan menjadi motivasi bagi perkembangan hukum, kecuali harus sesuai dengan akal hukum, juga sejiwa dengan perasaan dan keadilan hukum. Dan yang tidak kurang pentingnya putusan itu harus disirami roh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila hakim menyadari tanggung jawab demikian, lanjut Bismar, Insya Allah, sinisme keluhan masyarakat atau partner penegak hukum, buat apa susah dan capek melaporkan dan melakukan tindakan hukum, bila hukumannya tidak dirasakan sebagai hukuman oleh si pelaku-pelanggar hukum, bahkan kemungkinan menjadi bumerang bagi si pelapor itu sirna dengan sendirinya. Camkanlah para Hakim !!! Kepadamu tertumpu segala harapan.

III. PENUTUP

Dengan merujuk pada pembahasan atau uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi para ahli hukum tentang penemuan hukum tidak memperlakukan perbedaan prinsipil, karena masing-masing ahli hukum mencoba melihat berdasarkan realitas aliran yang dianut oleh negara di mana ahli hukum itu hidup. Kemudian ada konteks yang dianggap bukan sebagai penafsiran. Karena apabila suatu aturan undang-undang dilihat diluar konteks teks atau

term yang ada, maka itulah yang disebut dengan penemuan hukum.

2. Penemuan hukum dapat dilakukan dengan memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu peristiwa hukum. Metode interpretasi sebagai salah satu penemuan hukum akan memberikan penjelasan secara gamblang tentang teks suatu undang-undang agar ruang lingkup dari undang-undang itu dapat ditetapkan sebagai suatu keputusan hukum. Metode interpretasi merupakan alat atau sarana untuk mengetahui makna suatu undang-undang, sehingga dengan metode ini keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh penegak hukum dapat melahirkan kewibawaan hukum itu sendiri.
3. Penemuan hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim. Ia harus mendasarkan pada pelbagai argumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *"Hirarki Perundang-undangan dalam "das sollen" dan "das sein",* (Artikel), Fajar, 7 September 1994.
- _____. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Cordoza, Benjamin N. *The Nature of Judicial Process*, New Haven, Yale University Press, 1921.
- Curzon, L.B. *Jurisprudence*, M & E Handbook, 1979.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persaada, 1994.

Judul Berita, “*Lembaga Peradilan Hendaknya Introspeksi*”, Kompas, 10 Januari 1996.

Kaligis, O.C. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 2, Bandung, Alumni, 2007.

Kuncahyono, Trias. “*Keadilan Bukan Soal Untung Rugi*”, (Artikel), Kompas, 30 Juli 1994.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, 1999.

Pangaribuan, Luhut MP. “*Hukum Pengadilan dan Demokrasi*”, (Artikel), Republika, 25 Januari 1995.

_____. “*Problem Teknis dan Struktural Pengadilan*”, (Artikel), Republika, 11 April 1994.

Rahardjo, Satjipto. “*Membangun Keadilan Alternatif*”, (Artikel), Kompas, 5 April 1995.

_____. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

_____. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, t.th.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991.

Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar I Bismar Siregar*, Jakarta, Rajawali, 1989.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Catatan Akhir:

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994, h.11.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, 1999, h.145.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, h.147.

⁵Lihat Artikel Trias Kuncahyono, “*Keadilan Bukan Soal Untung Rugi*”, **Kompas**, 30 Juli 1999, h.6.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h.147.

⁷*Ibid.*, h.148.

⁸*Ibid.*

⁹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, h. 146.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

¹¹*Ibid.*, h.149.

¹²*Ibid.*, h.152.

¹³*Ibid.*, h.154.

¹⁴Ahmad Ali, *Op.Cit.*, h.188. Banding pula dengan penjelasan Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, h.121-122.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h.168.

¹⁶Lihat uraian secara rinci tentang faham Utilitarian dalam: O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid-2, Bandung, Alumni, 2007, h.1-3.

¹⁷Lihat Surat Kabar Harian *Kompas*, 10 Januari 1996, h.10.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar I Bismar Siregar*, Jakarta, Rajawali, 1989, h.12-13.